

## Mengelola Konektivitas, Mengamankan Kepentingan : Diplomasi Ekonomi Maritim Indonesia di ASEAN MTWG

Windy Dermawan<sup>1\*</sup>, Henike Primawanti<sup>2</sup>, Finska Dita Auralia<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Padjadjaran, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : [windy.dermawan@unpad.ac.id](mailto:windy.dermawan@unpad.ac.id)

**Abstract.** *ASEAN Connectivity is a strategic agenda aimed at strengthening regional integration through the development of physical, institutional, and people-to-people connectivity. For Indonesia as an archipelagic state, the maritime transport sector plays a crucial role in supporting regional physical connectivity. This article analyzes the role and strategies of Indonesia's maritime economic diplomacy within the framework of ASEAN Connectivity, with particular attention to Indonesia's participation in the ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) as a sectoral cooperation forum. This study employs a qualitative approach using a literature-based design combined with policy analysis. Data are collected from official ASEAN documents, publications of relevant ministries and institutions, regional cooperation reports, and academic literature on economic diplomacy, regional connectivity, and ASEAN maritime cooperation. The data are analyzed through a descriptive-analytical method to identify Indonesia's position, diplomatic strategies, and policy implications arising from its engagement in the ASEAN MTWG. The findings indicate that the ASEAN MTWG serves as a strategic instrument for Indonesia to advance national interests in maritime transport and connectivity while enhancing its contribution to ASEAN's regional integration agenda. Through this forum, Indonesia seeks to align national priorities with regional objectives, particularly in maritime infrastructure development and the harmonization of maritime transport policies. However, Indonesia's maritime economic diplomacy continues to face challenges, including disparities in capacity among ASEAN member states and complex institutional coordination. This article contributes to international relations scholarship by highlighting the importance of ASEAN sectoral forums as arenas for maritime economic diplomacy.*

**Keywords:** ASEAN Connectivity; ASEAN Cooperation; ASEAN MTWG; Indonesia; Maritime Economic Diplomacy.

**Abstrak.** *ASEAN Connectivity merupakan agenda strategis ASEAN untuk memperkuat integrasi kawasan melalui pengembangan konektivitas fisik, kelembagaan, dan antar-masyarakat. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sektor transportasi maritim memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas fisik kawasan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran dan strategi diplomasi ekonomi maritim Indonesia dalam kerangka ASEAN Connectivity, dengan fokus pada keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) sebagai forum kerja sama sektoral ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari dokumen resmi ASEAN, publikasi kementerian dan lembaga terkait, laporan kerja sama regional, serta literatur akademik yang membahas diplomasi ekonomi, konektivitas kawasan, dan kerja sama maritim ASEAN. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi posisi Indonesia, pola diplomasi yang dijalankan, serta implikasi kebijakan dari partisipasi Indonesia dalam ASEAN MTWG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN MTWG berfungsi sebagai instrumen strategis bagi Indonesia dalam mendorong kepentingan nasional di bidang transportasi dan konektivitas maritim sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam agenda integrasi kawasan ASEAN. Melalui forum ini, Indonesia berupaya menyelaraskan kepentingan nasional dengan agenda regional, khususnya dalam pengembangan infrastruktur maritim dan harmonisasi kebijakan transportasi laut. Namun, diplomasi ekonomi maritim Indonesia masih menghadapi tantangan berupa perbedaan kapasitas antarnegara anggota dan kompleksitas koordinasi kelembagaan. Artikel ini berkontribusi pada kajian hubungan internasional dengan menegaskan pentingnya forum sektoral ASEAN sebagai arena diplomasi ekonomi maritim.*

**Kata kunci:** ASEAN Connectivity; ASEAN MTWG; Diplomasi Ekonomi Maritim; Indonesia; Kerja Sama ASEAN.

## 1. LATAR BELAKANG

Dalam ruang lingkup kehidupan sosial, upaya suatu negara untuk menjaga integritas negaranya ialah perlu dibentuknya organisasi yang menaungi suatu negara dalam menjaga martabat serta kedaulatan yang mencakup seluruh entitas didalamnya. Salah satu organisasi internasional yang menghimpun negara-negara di Asia Tenggara ialah ASEAN. ASEAN sendiri menjadi organisasi internasional yang keberadaannya telah diakui dunia, tak jarang para aktor negara maupun non-negara mengakui peran dan kinerja ASEAN dalam menjaga kestabilan negara-negara yang dinaunginya. Sejak pertama didirikannya ASEAN pada Agustus 1967 silam, awalnya ASEAN hanya terdiri dari lima negara saja, namun setelah organisasi ini dikenal sebagai organisasi Kawasan yang paling stabil dan dinamis, ASEAN berhasil menarik perhatian negara-negara lain di dunia (Keling, Hishamudin, Saludin, Shuib, & Ajis, 2011).

Terdapat tujuan-tujuan didirikannya ASEAN diantaranya ialah menjaga perdamaian serta keamanan negara dan entitas didalamnya, memperkuat nilai dan norma yang berlaku di dalam wilayah, meningkatkan ketahanan regional dan mempromosikan kerja sama dalam bidang politik, keamanan, dll. Tujuan lain ialah melestarikan Asia Tenggara sebagai negara yang mampu bersaing dalam ranah global. Setiap kerangka kerja ASEAN secara terstruktur mengalami kemajuan dalam setiap tahunnya. Pada piagam ASEAN 2007, kontribusi negara-negara ASEAN menempatkan Kerjasama pada dasar yang lebih formal, dengan tujuan dan mekanisme yang lebih rinci dan terstruktur. Berdasarkan pernyataan tersebut, ditegaskan melalui KTT ASEAN (*ASEAN Summit*) yang terdiri dari kepala negara atau pemerintahan, yang secara terjadwal telah ditetapkan setiap dua kali setahun untuk menyelenggarakan pertemuan (Russell, 2020).

Pada beberapa tahun kebelakang, setiap negara anggota yang tergabung telah menerima program kerjasama baru yang diusung melalui *ASEAN Connectivity* atau dikenal dengan sebutan *ASEAN Connectivity*, secara umum konektivitas ASEAN menekankan tiga pilar kerja sama regional yang mengusung sub-bidang didalamnya seperti integrasi keamanan, sosial budaya, dan ekonomi (Susanto, 2011). *ASEAN Connectivity* mempunyai nama dalam bidang operasionalnya yaitu ‘Master Plan ASEAN Connectivity 2025’, dalam MPAC terdapat tiga pilar yang menjadi pedoman rencana konektivitas ASEAN diantaranya, *physical connectivity*, *institutional connectivity*, dan *people-to-people connectivity* (Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, 2017). Untuk membuat sistem transportasi laut regional kompetitif dengan orang lain, pengembangan framework memiliki tiga strategi utama, yaitu layanan unitisasi, layanan tanpa batas, dan layanan berkecepatan tinggi (ASEAN, 2002).

Dengan demikian, salah satu program unggulan dalam proyek konektivitas ASEAN adalah mengembangkan sistem transportasi baik darat, laut maupun udara.

Pembentukan konektivitas ini berawal dari implementasi visi pemimpin ASEAN untuk membangun komunitas ASEAN pada tahun 2015 silam. Visi tersebut bertujuan untuk menyerukan negara-negara anggota ASEAN yang saling terhubung dengan baik yang akan berkontribusi ke arah yang lebih kompetitif sekaligus menjadikan ASEAN menjadi organisasi yang tangguh (Aritenang, 2017). Dilansir dari salah satu jurnal yang berjudul “*Connecting South East Asia: A Blueprint For ASEAN Connectivity*” (Susanto, 2011) dalam catatan *blueprint* tersebut disebutkan bahwa, *goals* dibentuknya Konektivitas ASEAN ini menyangkut kepada peningkatan pembangunan, investasi, juga mempersempit kesenjangan pembangunan sekaligus mampu memberikan fasilitas yang baik kebutuhan masyarakat ASEAN. Namun, jika di akumulasikan total luas daratan di ASEAN mencapai 4,4 juta KM persegi, dimana ASEAN dihadapkan dengan segala tantangan seperti masyarakat miskin, kualitas jalan dan akses jalan yang tidak lengkap (Secretariat, ASEAN Connectivity: Project Information Sheets, 2012). Salah satu proyek infrastruktur unggulan yang menghadirkan konektivitas antar negara-negara ASEAN ialah *ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG)*.

Proyek tersebut menyangkut kepada aspek aktivitas transportasi maritim yang diselenggarakan antara anggota ASEAN. Dilansir oleh laman berita pertemuan *ASEAN Transport Facilitation Working Group* (PUBLIK, 2015). kembali digelar pada 22-23 April 2015 silam, topik rangkaian forum Kerjasama tersebut menyangkut bidang transportasi dalam menghadapi konektivitas ASEAN terutama pada negara Indonesia. Selain itu, berita lain yang menafsirkan hal yang serupa dengan pernyataan diatas ialah pada forum yang diselenggarakan pada tahun lalu, dimana Indonesia menghadiri pertemuan ASEAN MTWG ke-40. Kemudian, pembahasan menyinggung persoalan mengenai pembangunan mekanisme infrastruktur nasional baik dalam pengembangan pelabuhan maupun jalan untuk memberikan akses yang lebih baik ke pelabuhan lainnya (RFP, Fardah, & Haryati, 2021).

Perkembangan kerja sama regional di Asia Tenggara menunjukkan bahwa integrasi tidak lagi hanya dipahami dalam kerangka normatif dan institusional, tetapi juga diwujudkan melalui pembangunan konektivitas yang bersifat konkret dan fungsional. Sejak diberlakukannya Piagam ASEAN 2007, ASEAN menempatkan kerja sama regional pada basis yang lebih formal dengan tujuan dan mekanisme yang terstruktur, termasuk melalui penguatan konektivitas kawasan sebagai prasyarat pembentukan *ASEAN Community*. Dalam konteks tersebut, *ASEAN Connectivity*—yang dioperasikan melalui *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) 2025—menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing

kawasan, memperkuat integrasi ekonomi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarnegara anggota.

Sejumlah studi sebelumnya menekankan bahwa konektivitas ASEAN berfungsi sebagai enabler integrasi regional melalui tiga pilar utama, yakni *physical connectivity*, *institutional connectivity*, dan *people-to-people connectivity* (Susanto, 2011; ASEAN Secretariat, 2017). Penelitian lain menyoroti peran infrastruktur transportasi, khususnya sektor maritim, sebagai elemen kunci dalam memperlancar arus perdagangan, investasi, dan mobilitas antarnegara ASEAN (Funfgeld, 2019; Müller, 2018). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat makro dan normatif, dengan fokus pada kebijakan regional secara umum, sementara analisis yang secara spesifik menelaah forum teknis sektoral ASEAN sebagai arena diplomasi ekonomi negara anggota masih relatif terbatas.

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menyoroti *ASEAN Maritime Transport Working Group* (MTWG) sebagai salah satu forum teknis utama dalam pilar *physical connectivity*, serta menganalisis bagaimana Indonesia memanfaatkan MTWG sebagai instrumen diplomasi ekonomi untuk mendorong kepentingan nasionalnya dalam kerangka konektivitas ASEAN. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap MTWG tidak semata sebagai forum teknokratis, tetapi sebagai ruang strategis bagi Indonesia untuk membangun pengaruh, mengoordinasikan kepentingan infrastruktur maritim, dan memperkuat posisi nasionalnya dalam integrasi ekonomi kawasan. Analisis ini menjadi relevan dan mendesak mengingat karakter Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di ASEAN, dengan ketergantungan tinggi terhadap konektivitas maritim sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Connectivity* melalui keterlibatannya dalam *ASEAN Maritime Transport Working Group*, serta menilai peran MTWG sebagai instrumen diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendukung pembangunan konektivitas maritim dan pencapaian kepentingan nasional di tingkat regional ASEAN. Penulis tertarik untuk menelaah dan menganalisis strategi Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Connectivity* melalui *ASEAN Maritime Transport Working Group*. Karena penulis rasa Indonesia perlu meningkatkan hubungan diplomasi melalui program kerjasama yang dinaungi dalam konektivitas fisik mengenai infrastruktur yang lebih baik, tentu hal tersebut ada keterkaitannya terhadap kepentingan nasional Indonesia melalui diplomasi ekonomi yang diperantarai oleh *ASEAN Connectivity*.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berangkat dari tiga kerangka teoretis utama dalam Studi Hubungan Internasional dan ekonomi politik regional, yaitu regionalisme dan integrasi regional, konektivitas sebagai instrumen integrasi, serta diplomasi ekonomi dalam forum multilateral teknis. Ketiga pendekatan ini digunakan secara komplementer untuk menganalisis peran *ASEAN Maritime Transport Working Group* (MTWG) sebagai arena strategis bagi Indonesia dalam mendorong kepentingan nasional melalui penguatan konektivitas maritim ASEAN.

Dalam literatur Hubungan Internasional, regionalisme dipahami sebagai proses pembentukan pola kerja sama dan tata kelola kawasan melalui institusi, norma, dan praktik bersama antarnegara (Hurrell, 1995). Hurrell membedakan regionalisme ke dalam beberapa dimensi, termasuk regionalisme sebagai *inter-state cooperation*, *economic integration*, dan *regional governance*. Dalam konteks ASEAN, regionalisme berkembang secara gradual dan pragmatis, dengan menekankan konsensus, fleksibilitas, dan non-intervensi, yang sering disebut sebagai *ASEAN Way*. Acharya (2009) memperkuat pemahaman ini dengan memperkenalkan konsep *regional order and normative localization*, yang menjelaskan bahwa institusi regional di Asia Tenggara tidak meniru secara utuh model integrasi Barat, tetapi menyesuaikannya dengan norma dan konteks lokal. Integrasi ASEAN dengan demikian tidak bersifat supranasional, melainkan berbasis pada kerja sama fungsional dan sektoral yang memungkinkan negara anggota tetap mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Dalam kerangka ini, integrasi regional ASEAN tidak hanya dinilai dari harmonisasi kebijakan makro, tetapi juga dari kemampuan kawasan membangun mekanisme implementatif yang efektif. Forum teknis seperti MTWG menjadi instrumen penting karena berfungsi sebagai penghubung antara kesepakatan normatif tingkat regional dan pelaksanaan kebijakan di tingkat sektoral.

Konsep konektivitas dalam ASEAN berkembang sejalan dengan pemikiran *new regionalism* yang dikemukakan oleh Hettne dan Söderbaum (2000), yang memandang regionalisme sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial. Dalam perspektif ini, konektivitas tidak hanya dipahami sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi sebagai instrumen strategis yang membentuk interaksi lintas negara dan distribusi manfaat integrasi regional. *ASEAN Connectivity*, sebagaimana dirumuskan dalam *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC), menekankan tiga pilar utama: *physical connectivity*, *institutional connectivity*, dan *people-to-people connectivity*. Transportasi maritim sebagai bagian dari *physical connectivity* memiliki peran krusial dalam mendukung integrasi ekonomi ASEAN, mengingat karakter geografis kawasan dan ketergantungan tinggi terhadap jalur laut.

Mengacu pada Hettne, konektivitas dapat dipahami sebagai sarana untuk membangun *regionness*, yaitu tingkat kedalaman dan kohesi suatu kawasan. Infrastruktur maritim dan kebijakan transportasi lintas negara bukan hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga memperkuat identitas dan interdependensi kawasan. Dengan demikian, kebijakan konektivitas maritim ASEAN merupakan arena politik ekonomi regional, di mana negara anggota berupaya memaksimalkan kepentingan nasionalnya dalam kerangka kerja sama kawasan.

Untuk menganalisis peran Indonesia dalam MTWG, penelitian ini menggunakan pendekatan diplomasi ekonomi, yang memandang kebijakan ekonomi luar negeri sebagai bagian integral dari strategi diplomasi negara. Diplomasi menurut Diamond dan McDonald (1996) adalah mekanisme yang dirancang untuk membangun dan memelihara jaringan dan hubungan antara aktor tradisional dan aktor baru dalam mengejar ketergantungan dengan tujuan yang sama (Diamond & McDonald, 1996). Diplomasi dikonseptualisasikan sebagai bentuk penyelenggaraan hubungan antar negara yang bersifat internasional melalui negosiasi dan dialog atau dengan cara lain yang berfungsi untuk mempromosikan hubungan damai antar negara (Cornago, 2008). Diplomasi ekonomi tidak hanya dilakukan melalui perjanjian perdagangan atau forum tingkat tinggi, tetapi juga melalui forum teknis multilateral yang bersifat sektoral dan implementatif. Diplomasi Ekonomi adalah tentang proses dan praktik tata negara dalam bidang ekonomi yang disusun secara terstruktur, namun disamping itu diplomasi ekonomi dianggap sebagai saluran sempit yang melalui semua ekspresi keterkaitan antara IPE (*International Political Economy*) dan studi diplomatik (Okano-Heijmans, 2011).

Dalam perspektif Acharya (2014), forum-forum teknis regional berfungsi sebagai *sites of practice*, di mana norma, kepemimpinan, dan pengaruh negara anggota dibangun melalui interaksi berulang dan kerja sama fungsional. MTWG, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai ruang strategis bagi Indonesia untuk mempraktikkan kepemimpinan sektoral (*sectoral leadership*) di bidang konektivitas maritim. Mempertegas pernyataan diatas, salah satu jurnal menyebutkan *Economic Diplomacy* berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dalam bidang ekonomi seperti penetapan standar seperti WTO dan BIS, selain itu para perwakilan delegasi diplomasi ekonomi juga memantau serta melaporkan kebijakan ekonomi diluar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Saner & Yiu). Sebagai negara kepulauan terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan struktural dalam penguatan konektivitas maritim, baik untuk mendukung perdagangan intra-ASEAN maupun untuk memperkuat posisi geostrategisnya. Partisipasi aktif Indonesia dalam MTWG mencerminkan

strategi diplomasi ekonomi yang memanfaatkan forum teknis ASEAN sebagai sarana untuk menyelaraskan kepentingan nasional dengan agenda integrasi regional.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Sebuah riset kualitatif ini selalu berkaitan dengan pengembangan penjelasan tentang fenomena sosial (Hancock, Ockleford, & Windridge, 2009). Dasar pemikiran digunakannya metode ini untuk membantu memahami dunia sosial dimana kita hidup dan mengapa segala sesuatunya seperti itu serta untuk menyusun serta menjabarkan kriteria permasalahan yang akan di teliti berfokus pada pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis suatu kejadian atau fenomena secara sosial sehingga memudahkan peneliti untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan diteliti. Seperti yang telah diketahui, kontribusi negara-negara ASEAN menempatkan kerjasama pada dasar yang lebih formal yang diawali sejak piagam ASEAN 2007, dengan tujuan dan mekanisme yang lebih rinci dan terstruktur. Demikian dengan hadirnya konsep *ASEAN Connectivity*, yang secara umum menekankan tiga pilar kerja sama regional yang mengusung sub-bidang didalamnya. Konsep tersebut menekankan adanya Kerjasama antara negara-negara di ASEAN khususnya Indonesia yang kini telah sepakat membentuk mekanisme infrastruktur nasional yang mampu memfasilitasi masyarakat di Indonesia melalui *ASEAN Maritime Transport Working Group*.

Data yang digunakan penulis dalam riset ini merujuk pada data sekunder. Data sekunder menurut Bouslagh adalah data yang diperoleh tidak secara langsung oleh penulis atau peneliti, melainkan adalah hasil pengumpulan analisis data dari orang lain (Martins, Serra, & Cunha, 2018). Analisis data sekunder bersifat fleksibel dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai cara, pengambilan jenis data melalui data sekunder ini merupakan bentuk empiris dengan langkah-langkah dan prosedural dan evaluatif. Adapun keuntungan dalam menggunakan data sekunder yaitu seringkali proses pengumpulan data diinformasikan oleh keahlian dan profesionalisme yang mungkin tidak tersedia untuk proyek yang lebih kecil (Boslaugh, 2007). Suatu kasus yang akan dianalisis, seperti dalam penelitian ini sumber data yang dipakai menggunakan *literature review* dengan memanfaatkan jurnal dan studi literatur lain yang tersedia di internet, buku dan jurnal-jurnal terdahulu, serta sumber terbaru lainnya meliputi skripsi atau tesis penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Konektivitas ASEAN (*ASEAN Connectivity*) merupakan sebuah implementasi dasar yang dibentuk oleh masing-masing negara di ASEAN yang mampu menghadapi siklus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *ASEAN Connectivity* diwujudkan melalui Master Plan on ASEAN Connectivity pada tahun 2010 dan 2025. *ASEAN Connectivity* sering kali dikonseptualisasikan sebagai program kerjasama antar negara di Kawasan Asia Tenggara guna mewujudkan *ASEAN Community*, berdasarkan catatan MPAC, Konektivitas ASEAN ada untuk pengembangan infrastruktur, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat (Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, 2017). Hal tersebut berlandaskan dari adanya *the main purpose* pada Konektivitas ASEAN yaitu menjadikan segenap negara di Kawasan Asia Tenggara lebih mampu bersaing di ranah global.

Berdasarkan rekap catatan mengenai *Master Plan On ASEAN* (MPAC) oleh secretariat ASEAN di Jakarta, disebutkan bahwa Konektivitas di ASEAN memiliki tiga dimensi yang melandasi setiap proyek yang dibangun dalam *ASEAN Connectivity* diantaranya ialah *Physical Connectivity* meliputi transportasi, TIK, dan energi, yang kedua *Institutional Connectivity* yang didalamnya meliputi perdagangan, investasi, dan liberalisasi perdagangan jasa (perusahaan dan individu bebas untuk melakukan interaksi perdagangan hingga batas wilayah negara), dan dimensi yang ketiga ialah *People-to-people Connectivity* dengan elemen yang terikat yaitu pendidikan, budaya dan pariwisata. Setiap negara anggota ASEAN memiliki keterkaitan atas kerjasama yang dibentuk dalam Konektivitas ASEAN. Seperti yang terkandung dalam *Master Plan on ASEAN* (MPAC), visi dari Konektivitas ASEAN sendiri merupakan visi yang diimplementasikan untuk menjadikan negara-negara anggota ASEAN yang lebih terhubung, terintegrasi, serta komprehensif yang akan mendorong daya saing setiap negara anggota ASEAN, visi tersebut berbunyi “*to achieve a seamlessly and comprehensively connected and integrated ASEAN that will promote competitiveness, inclusiveness, and a greater sense of community*” (Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, 2017).

Berdasarkan ketiga pilar/dimensi dari Konektivitas ASEAN, dalam artikel ini, penulis berusaha untuk mengangkat salah satu dari ketiga pilar tersebut yaitu *Physical Connectivity* (Konektivitas Fisik) dengan elemen yang terkait dengan transportasi, TIK, dan Energi Infrastruktur. Kemudian pembentukan kerangka peraturan dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memberikan layanan terkait dan utilitas (Cambodia, 2022). Konektivitas fisik memainkan peran penting dalam mencapai ASEAN yang lebih terintegrasi secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui infrastruktur yang memfasilitasi perdagangan dan investasi (Cambodia, 2022). Beberapa agenda kegiatan dalam mewujudkan visi dari Konektivitas



ASEAN yaitu dimana Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan *ASEAN Community*.

### **Kontribusi Indonesia dalam *ASEAN Connectivity***

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki letak negara yang strategis dengan jumlah penduduk sekitar 261,1 juta jiwa berdasarkan catatan The World Bank. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia dipandang sebagai negara yang aktif dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN sangat besar, melihat bahwa kontribusi Indonesia dalam setiap forum yang diselenggarakan menghasilkan banyak proyeksi yang berhasil dibangun, tidak hanya itu peran penting Indonesia juga digambarkan melalui kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Indonesia serta warisan budaya yang telah menjadi *icon* negara Indonesia yang menjadi salah satu bentuk peran penting dalam pembangunan dan integrasi di Kawasan ASEAN (Irawan, 2018). Dilansir dari laman Kompas.com (Kompas.com, 2022), peran penting Indonesia dalam ASEAN dipertegas dalam laman berita tersebut, disebutkan bahwa peran penting Indonesia memiliki 5 uraian diantaranya ialah Indonesia sebagai pendiri ASEAN, penggagas komunitas keamanan ASEAN, penyelenggara KTT pertama, menciptakan perdamaian di Asia serta turut andil dalam SEA Games yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali.

Dinamika hubungan antar negara anggota ASEAN juga direpresentasikan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang secara tidak langsung sadar akan pentingnya sebuah integrasi pada setiap negara di Asia Tenggara. Melalui Konektivitas ASEAN, negara-negara di ASEAN juga terintegrasi dalam MEA yang nantinya mampu mewujudkan serta memberikan peluang bagi anggota untuk tumbuh dan berkembang. Namun seiring berjalannya waktu, tidak sedikit kemajuan teknologi serta infrastruktur akan memicu lahirnya masalah baru yang akan mengganggu kecepatan pertumbuhan setiap negara anggota (Widiyana & Djatmiko, 2019).

Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan tingkat ekonomi terbesar ke-10 di dunia, dalam ASEAN Indonesia juga berhasil membuat kemajuan besar dalam pengentasan kemiskinan. Upaya demi upaya yang dikerahkan Indonesia dalam mengoptimalkan perekonomian negaranya melalui kerja sama yang didorong untuk meraih tingkat pemulihan yang lebih cepat dan berkelanjutan. Merujuk pada laman The World Bank, perencanaan ekonomi di Indonesia mengikuti rencana pembangunan 20 tahun, mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 (Bank, 2022). Indonesia juga berurusan dalam pembentukan strategi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang berjarak sekitar 5 tahun atau sering disebut dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dengan masing-masing

prioritas pembangunan yang berbeda (Bank, 2022). Demikian pembentukan rencana pembangunan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang lebih kuat dengan meningkatkan sumber daya dan daya saing negara di pasar global (Bank, 2022). Ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada tahun 2020 lalu, Indonesia mengalami sedikit guncangan yang mengakibatkan siklus perekonomian tidak stabil, semua daya dan upaya oleh pemerintah Indonesia dikerahkan agar perekonomian negara tetap stabil dan tidak berdampak pada masyarakat. Merujuk pada salah satu situs resmi *ministry of investment/BPKM* disebutkan bahwa langkah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun 2022, dimana Indonesia menargetkan realisasi investasi hingga Rp1,200 triliun, untuk merealisasikan langkah tersebut, Indonesia menanam modal baik lokal maupun asing hingga 22-23 persen (Investment, 2017).

Kontribusi Indonesia dalam ASEAN Connectivity tidak dapat dilepaskan dari posisi strukturalnya sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan aktor sentral dalam dinamika integrasi kawasan. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum sektoral ASEAN, khususnya di bidang transportasi dan konektivitas maritim, Indonesia berupaya menjembatani kepentingan nasional dengan agenda regional. Partisipasi Indonesia dalam perumusan kebijakan, harmonisasi standar, dan pengembangan kerangka kerja konektivitas mencerminkan strategi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membentuk arah integrasi ASEAN. Dalam konteks ini, kontribusi Indonesia berfungsi sebagai *enabler* bagi penguatan *physical connectivity* kawasan, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dalam jaringan produksi dan logistik regional.

Lebih jauh, kontribusi Indonesia dalam ASEAN Connectivity juga menunjukkan bagaimana diplomasi ekonomi dijalankan melalui mekanisme kerja sama teknis yang berkelanjutan. Melalui forum-forum seperti *ASEAN Maritime Transport Working Group*, Indonesia tidak hanya menyuarakan kepentingannya, tetapi juga berperan dalam membangun konsensus regional terkait prioritas konektivitas, termasuk penguatan jalur pelayaran intra-ASEAN, peningkatan efisiensi pelabuhan, dan penyelarasan kebijakan transportasi maritim. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran kepemimpinan sektoral tanpa menabrak prinsip non-intervensi dan konsensus yang menjadi ciri ASEAN. Dengan demikian, kontribusi Indonesia dalam ASEAN Connectivity dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi fungsional yang secara bertahap memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur integrasi ekonomi dan konektivitas kawasan.

**Kerjasama Indonesia melalui ASEAN Maritime Transport Working Group**

Demi mencapai suatu rencana yang akan di bangun, setiap negara kian berbondong-bondong mengerahkan pengaruh bisnis dan daya saing kepada negara di sekitar Kawasan maupun diluar Kawasan. Salah satu proyek yang memiliki *influence* besar pada bisnis serta daya saing suatu negara ialah infrastruktur, transportasi dan TIK. Pengaruh tersebut memiliki timbal balik yang sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Demikian, Indonesia sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia dengan kurang lebih terdiri dari 17.000 pulau dengan dua pertiga (54.716 km) wilayahnya adalah lautan. Oleh sebab itu, Indonesia menduduki negara yang memiliki peran yang besar terhadap potensi ekonomi sektor kelautan dengan mengerahkan kontribusi maritim melalui pembangunan proyek transportasi maritim guna mewujudkan konektivitasnya di ASEAN. Kontribusi sektor maritim Indonesia dibawah 30% dari anggaran nasional, 3 potensi output yang optimal adalah 1,3 triliun /tahun atau sekitar sepuluh kali lipat dari anggaran nasional saat ini (Salim, Pranata, & Tobing, 2017).

Dalam pilar Konektivitas Fisik ASEAN, salah satu proyek di beberapa wilayah ASEAN direalisasikan dalam *Maritime Transport and Inland Waterways* yang dimana Transportasi Laut dan Perairan Darat ASEAN memiliki sekitar 51.000 KM jalur air pedalaman yang dapat dilayari, dengan tujuan dan manfaat yaitu menilai kelayakan penetapan rute Roll-on dan Roll off di ASEAN sedangkan manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan kapasitas kapal dan kargo, yang bekerja untuk meningkatkan pengiriman di seluruh Kawasan dan menurunkan biaya logistic (Secretariat, ASEAN Connectivity: Project Information Sheets, 2012). Indonesia merancang sebuah proyek transportasi maritim melalui *ASEAN Maritime Transport Working Group* dalam menghadapi konektivitas ASEAN, pada forum ASEAN MTWG ke-37 di Singapura, delegasi untuk Indonesia menghadiri pertemuan tersebut untuk membahas tentang pengimplementasian Rute RoRo Dumai-Malaka, Capt. Wisnu dalam forum menyampaikan informasi bahwa Indonesia telah membahas persoalan terkait persiapan pengoperasian RoRo Dumai-Malaka sejak September tahun 2018 (Portal, 2019). Selain itu, pengimplementasian tersebut juga berpengaruh pada konektivitas angkutan darat antara negara Malaysia dan Thailand. Kesepakatan tersebut tentu menjadi tiket untuk Indonesia dalam mengembangkan dan mengoptimalkan perekonomian di negaranya.

Dengan demikian, pandemi bukan jadi penghalang bagi negara anggota ASEAN terutama bagi Indonesia dalam mewujudkan Konektivitas ASEAN. Pada bulan maret tahun 2021 kemarin, *ASEAN Maritime Transport Working Group* (MTWG) menggelar kembali pertemuan ke-40 secara virtual dengan Kementrian Perhubungan Indonesia sebagai delegasi untuk Indonesia. Dilansir dari laman eMaritim.com, disebutkan bahwa pertemuan tersebut kini membahas mengenai koordinasi mengenai mekanisme pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan dan akses jalan ke pelabuhan lain (eMaritime.com, 2021). Berikutnya, dalam pertemuan ke-40 tersebut para perwakilan delegasi untuk Indonesia juga berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dalam forum tersebut dalam peningkatan kapasitas 47 pelabuhan, termasuk 14 pelabuhan Indonesia, serta perkembangan operasi dan keberlangsungan jalur pelayaran penyeberangan RoRo untuk Dumai – Melaka dan juga Bitung di Sulawesi Utara – Davao di Filipina (eMaritime.com, 2021).

Keterlibatan Indonesia dalam MTWG mencerminkan strategi diplomasi ekonomi yang berorientasi pada pemanfaatan forum teknis ASEAN untuk memperkuat kepentingan nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan, Indonesia memiliki kepentingan struktural dalam penguatan konektivitas maritim, baik untuk mendukung perdagangan intra-ASEAN maupun untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan logistik regional. Partisipasi aktif Indonesia dalam pembahasan kebijakan maritim ASEAN menunjukkan upaya untuk mendorong agenda nasional agar selaras dengan prioritas regional. Dalam kerangka diplomasi ekonomi, MTWG menjadi arena strategis bagi Indonesia untuk membangun pengaruh secara bertahap melalui kepemimpinan sektoral dan kontribusi teknis, sejalan dengan karakter integrasi ASEAN yang berbasis konsensus dan kerja sama fungsional.

Kerja sama Indonesia melalui *ASEAN Maritime Transport Working Group* (MTWG) menunjukkan bagaimana forum teknis ASEAN dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam mendorong kepentingan nasional di tengah proses integrasi kawasan. Partisipasi Indonesia dalam MTWG tidak hanya berfokus pada aspek teknis transportasi maritim, tetapi juga diarahkan untuk menyelaraskan agenda nasional dengan prioritas *ASEAN Connectivity*, khususnya dalam pilar *physical connectivity*. Melalui keterlibatan aktif dalam pembahasan standar keselamatan pelayaran, pengembangan pelabuhan, dan peningkatan efisiensi logistik laut, Indonesia berupaya memperkuat posisi maritimnya sekaligus berkontribusi pada peningkatan konektivitas kawasan. Pola kerja sama ini mencerminkan karakter regionalisme ASEAN yang bersifat pragmatis dan fungsional, di mana integrasi dijalankan melalui mekanisme sektoral yang memungkinkan negara anggota mempertahankan otonomi kebijakan nasional.

Lebih jauh, keterlibatan Indonesia dalam MTWG dapat dipahami sebagai praktik diplomasi ekonomi berbasis forum teknis, yang memungkinkan pembangunan pengaruh secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan konektivitas maritim kawasan selaras dengan kebutuhan domestik dan visi pembangunan maritim nasional. MTWG menjadi arena *low-profile diplomacy* yang efektif, karena membuka ruang bagi negosiasi kepentingan, pertukaran pengetahuan teknis, dan pembentukan konsensus tanpa tekanan politik tingkat tinggi. Dalam perspektif *new regionalism*, kerja sama ini tidak hanya berkontribusi pada integrasi ekonomi ASEAN, tetapi juga memperkuat *regionness* kawasan melalui peningkatan interdependensi dan koordinasi di sektor maritim, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai aktor penting dalam arsitektur konektivitas regional ASEAN.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengindikasikan bahwa MTWG dapat dipahami sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang bersifat *low-profile* namun berdampak signifikan. Melalui forum ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai peserta kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang berupaya membentuk arah dan prioritas konektivitas maritim kawasan. Diplomasi yang dijalankan melalui MTWG bersifat teknis dan jangka panjang, namun justru memungkinkan terbangunnya kepercayaan, koordinasi, dan keselarasan kepentingan antarnegara anggota. Dalam perspektif Acharya, praktik diplomasi semacam ini mencerminkan bagaimana kepemimpinan regional dibangun melalui *sites of practice* di tingkat sektoral, bukan semata melalui pernyataan politik tingkat tinggi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *ASEAN Maritime Transport Working Group* (MTWG) memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi *ASEAN Connectivity*, khususnya pada dimensi *physical connectivity* melalui penguatan transportasi maritim kawasan. MTWG tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi teknis, tetapi juga sebagai mekanisme implementatif yang menjembatani kesepakatan normatif ASEAN dengan praktik integrasi sektoral di tingkat operasional. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi ASEAN berkembang secara gradual dan pragmatis melalui kerja sama teknis, sejalan dengan karakter regionalisme ASEAN yang berbasis konsensus dan fleksibilitas.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan Indonesia dalam MTWG mencerminkan strategi diplomasi ekonomi yang memanfaatkan forum teknis multilateral sebagai sarana untuk memperkuat kepentingan nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan struktural dalam penguatan konektivitas maritim, baik untuk mendukung perdagangan intra-kawasan maupun untuk memperkuat posisinya dalam jaringan logistik regional. Partisipasi aktif Indonesia dalam MTWG memungkinkan penyelarasan agenda nasional dengan prioritas regional, sekaligus membuka ruang bagi pembangunan pengaruh melalui kepemimpinan sektoral di bidang maritim.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian hubungan internasional dan ekonomi politik regional dengan menunjukkan bahwa forum teknis seperti MTWG dapat dipahami sebagai arena diplomasi ekonomi dan *sites of practice* dalam proses integrasi regional ASEAN. MTWG bukan sekadar instrumen teknokratis, tetapi bagian dari dinamika politik ekonomi kawasan yang membentuk pola interdependensi, koordinasi kebijakan, dan *regionness* ASEAN. Dengan demikian, pendekatan sub-regional dan sektoral menjadi mekanisme penting dalam mempercepat integrasi ekonomi ASEAN di tengah keterbatasan model integrasi supranasional.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, Indonesia perlu memperkuat konsistensi dan kapasitas institusional dalam keterlibatannya di MTWG agar peran strategis yang telah terbangun dapat berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan koordinasi antarinstansi nasional yang terlibat dalam isu transportasi maritim dan konektivitas kawasan, sehingga posisi Indonesia dalam forum MTWG tidak bersifat sporadis, melainkan terintegrasi dalam strategi diplomasi ekonomi nasional. Kedua, pada tingkat regional, efektivitas MTWG dalam mendorong konektivitas maritim ASEAN perlu didukung oleh peningkatan harmonisasi regulasi dan pengurangan kesenjangan kapasitas antarnegara anggota. Penguatan kerja sama teknis dan pertukaran pengetahuan dalam MTWG dapat menjadi instrumen untuk mengatasi perbedaan tingkat kesiapan infrastruktur dan institusional di kawasan. Ketiga, bagi pengembangan akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis terhadap forum teknis ASEAN lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran diplomasi sektoral dalam integrasi regional. Pendekatan komparatif antar-forum atau antarnegara anggota juga dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam menjelaskan variasi strategi dan efektivitas diplomasi ekonomi negara-negara ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2009). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (2nd ed.). Routledge.
- Acharya, A. (2014). *The end of American world order*. Polity Press.
- Aritenang, A. (2017). The potential development effect of ASEAN connectivity: The case of Riau Corridor. *Proceedings*, 339-347. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i2.2590>
- ASEAN. (2002). *ASEAN Maritime Transport Development Study: Final Report Summary* (p. 10).
- Bank, T. W. (2022, April 5). *The World Bank in Indonesia*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#1>
- Boslaugh, S. (2007). *An introduction to secondary data analysis*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511618802.002>
- Cambodia, M. o. (2022). *ASEAN Connectivity*. Retrieved from <https://www.mfaic.gov.kh/Page/2021-04-01-ASEAN-Connectivity>
- Cornago, N. (2008). Diplomacy. In *Encyclopedia of violence, peace, & conflict* (pp. 574-580). <https://doi.org/10.1016/B978-012373985-8.00050-7>
- Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi-track diplomacy: A systems approach to peace*. Kumarian Press.
- eMaritime.com. (2021, March 11). *Indonesia hadir pertemuan ke 40 ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG)*. Retrieved from <https://www.emaritim.com/2021/03/indonesia-hadiri-pertemuan-ke-40-asean.html>
- Funfgeld, A. (2019). The dream of ASEAN connectivity: Imagining infrastructure in Southeast Asia. *Pacific Affairs*, 92(2), 287-311. <https://doi.org/10.5509/2019922287>
- Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2009). *An introduction to qualitative research* (pp. 4-37). National Institute for Health Research.
- Hettne, B., & Söderbaum, F. (2000). Theorising the rise of regionness. *New Political Economy*, 5(3), 457-473. <https://doi.org/10.1080/713687778>
- Hurrell, A. (1995). Regionalism in theoretical perspective. In L. Fawcett & A. Hurrell (Eds.), *Regionalism in world politics: Regional organization and international order* (pp. 37-73). Oxford University Press.
- Investment, M. o. (2017). *Pandemic control is key to Indonesia's resilient economy*. Retrieved from <https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/pandemic-control-is-key-to-indonesias-resilient-economy>
- Irawan, A. P. (2018, November 19). *The role of Indonesia in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in dealing with haze and air pollution*. Binus University Faculty of Humanities. Retrieved from <https://ir.binus.ac.id/2018/11/19/the-role-of-indonesia-in-association-of-southeast-asian-nation-asean-in-dealing-with-haze-and-air-pollution/>
- Keling, M. F., H. M., Saludin, M. N., Shuib, M. S., & Ajis, M. N. (2011). The development of ASEAN from historical approach. *Asian Social Science*, 7(9), 169-189. <https://doi.org/10.5539/ass.v7n7p169>

- Kompas.com. (2022, February 11). Peran penting Indonesia dalam ASEAN. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2022/02/11/170100170/peran-penting-indonesia-dalam-asean?page=all>
- Martins, F. S., Serra, F. A., & Cunha, J. A. (2018). Secondary data in research: Uses and opportunities. *Iberoamerican Journal of Strategic Management*, 7(3), 2-4. <https://doi.org/10.5585/ijsm.v17i4.2723>
- Müller, L. M. (2018). Governing regional connectivity in Southeast Asia: The role of the ASEAN Secretariat and ASEAN's external partners. *Occasional Paper Series*, 13, 1-22.
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing economic diplomacy: The crossroads of international relations, economics, IPE, and diplomatic studies. *The Hague Journal of Diplomacy*, 6(1), 7-36. <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>
- Perwira, P. (2013). Dukungan Indonesia terhadap ASEAN connectivity dalam perspektif konstruktivisme. *Jurnal Skripsi*.
- Portal, A. (2019, March 5). Sidang ASEAN MTWG ke-37 di Singapura, Indonesia bahas konektivitas dan perkembangan. Retrieved from <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/5225/sidang-asean-mtwg-ke-37-di-singapura-indonesia-bahas-konektivitas-dan-perkembangan-transportasi-laut>
- PUBLIK, B. K. (2015, April 21). Pertemuan negara ASEAN di Surabaya bahas kerjasama transportasi. Retrieved from <http://dephub.go.id/berita/baca/pertemuan-negara-asean-di-surabaya-bahas-kerjasama-transportasi/?cat=QVNFQU4gVEZXRYBkYW4gQ0JUUCwgMjltMjMgQXByaWwgMjAxNXw=>
- RFP, A., Fardah, & Haryati, S. (2021, March 10). Indonesia attends 40th ASEAN Maritime Transport Working Group meeting. *Antara Indonesia News Agency*. Retrieved from <https://en.antaranews.com/news/169578/indonesia-attends-40th-asean-maritime-transport-working-group-meeting>
- Russell, M. (2020). *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. European Parliament.
- Salim, Z., Pranata, N., & Tobing, A. L. (2017). *Maritime logistics in ASEAN: An investment guidebook*. The Habibie Center.
- Saner, R., & Yiu, L. (n.d.). *International economic diplomacy: Mutations in post-modern times*. Discussion Papers in Diplomacy, 1-37.
- Secretariat, T. A. (2008). *The ASEAN Charter* (pp. 1-53).
- Secretariat, T. A. (2012). *ASEAN connectivity: Project information sheets*. Public Outreach and Civil Society Division.
- Secretariat, T. A. (2012). *ASEAN connectivity: Project information sheets*.
- Secretariat, T. A. (2017). *Master plan on ASEAN connectivity 2025* (pp. 6-8).
- Susanto, B. (2011). *Connecting Southeast Asia: A blueprint for ASEAN connectivity*. *Jurnal Transportasi*.
- Susantono, B. (2011). *Connecting Southeast Asia: A blueprint for ASEAN connectivity*. *Jurnal Transportasi*, 17(2), 77-86.
- Widiyana, P., & Djatmiko, A. (2019). The role of Indonesia in the ASEAN Economic Community. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(3), 16-17.